

# Media Indonesia

MEMBAWA SUARA RAKYAT

**HOTLINE**

Berlangganan & Customer Service

Telp/Fax: (021) 582-1303

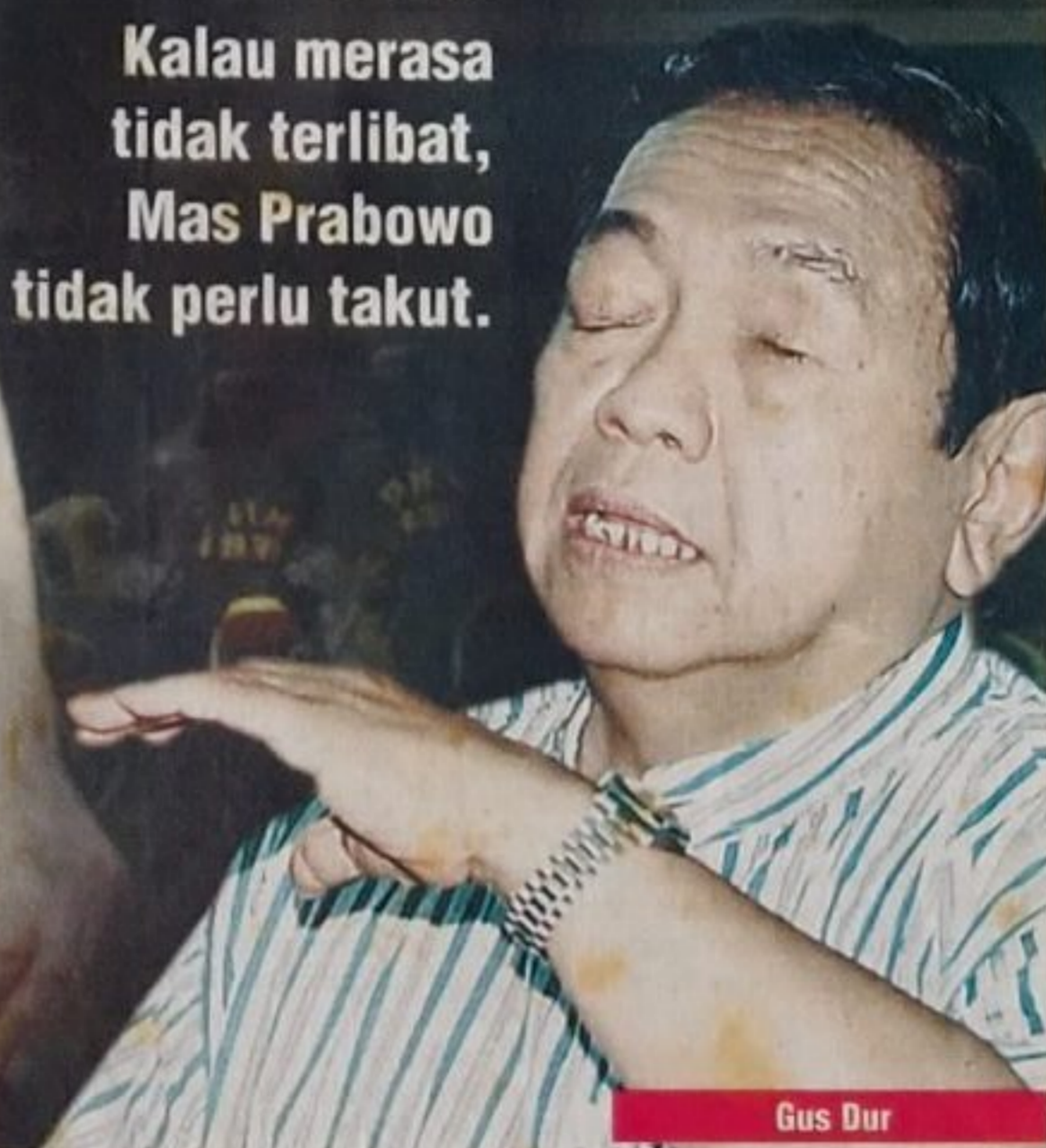
http://www.medialindo.co.id/

## Gus Dur Ungkap Pertemuan dengan Prabowo 15 Mei

■ Pangkostrad Minta Saran Atasi Kerusuhan



**Gus Dur:**  
Kalau merasa tidak terlibat, Mas Prabowo tidak perlu takut.



Gus Dur

JAKARTA (Media): "Mas Prabowo kan aparat. Jadi sampeyan yang bisa menyelesaikan kerusuhan," kata KH Abdurrahman Wahid kepada Media kemarin, menuruti dialognya dengan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto pada pertemuan 15 Mei dini hari.

Seperti diberitakan kemarin, Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, mengatakan bahwa pada 14 Mei 1998 sore Prabowo mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh ormas Islam, tokoh LSM, dan beberapa perwira tinggi ABRI. Termasuk di antaranya Pangdam Jaya Sjafrie Sjamsudin. Hashim sendiri hadir dalam pertemuan yang diprakarsai oleh Kodam Jaya itu. Malam harinya, menurut Hashim, Prabowo menemui Abdurrahman Wahid di kediaman Ciganjur. Tetapi Hashim tidak ikut hadir.

Dikawal beberapa mobil lengkap dengan pasukan, sekitar pukul 01.15 dini hari yang senyap, Prabowo mengetuk pintu rumah Gus Dur — panggilan akrab Abdurrahman Wahid — di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Gus Dur sendiri tengah tertidur dalam tidurnya.

Setelah dipersilakan masuk oleh staf pribadi Gus Dur, menantu Presiden Soeharto (waktu itu) masuk kamar tidur Gus Dur bersama Kaskostrad Mayjen TNI Kilfan Zein. Keduanya berseragam lengkap loreng-loreng. Semula Prabowo meminta kepada staf pribadi Gus Dur untuk tidak perlu membangunkan tuan rumah. Pelan-pelan Prabowo dengan ilmu bela diri yang dimiliki melakukan meditasi mencoba mengobati Gus Dur yang memang sedang sakit.

"Apa Bapak perlu dibangunkan?" tanya staf pribadi Gus Dur.

"Tidak usahlah," jawab Prabowo dengan suara agak keras. Mendengar suara Prabowo, Gus Dur terbangun dan menanyai siapa tamunya. Mengetahui Prabowo yang datang, Gus Dur mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan.

"Malam-malam begini kok ke sini Mas Prabowo, ada apa?" tanya Gus Dur.

"Begini Gus, saya sedang patroli, teringat Gus Dur. Jadi saya ke sini," jawab Prabowo.

Berbincangan kemudian semakin serius menyangkut kerusuhan. Intinya Prabowo minta saran Gus Dur, bagaimana mengatasi kerusuhan yang saat itu tengah marak berlangsung di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

"Lo, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai aparat ya, sampeyan yang mestinya tahu bagaimana mengatasinya. Habis mereka tidak mau mendengarkan lagi," jawab Gus Dur sebagaimana dituturkan staf pribadinya.

"Gus Dur kan tokoh yang sangat berpengaruh," ujar Prabowo. "Ya, kalau saya berpengaruh mestinya orang-orang itu mau mendengar saya, pasti tidak terjadi kerusuhan seperti ini," jawab Gus Dur lagi.

Prabowo juga mengeluhkan banyak pihak yang menuduh dirinya terlibat aksi kerusuhan itu.

"Ya, kalau merasa tidak terlibat, Mas Prabowo tidak perlu takut," tukas Gus Dur.

Pertemuan malam itu berlangsung hanya sekitar satu jam. Prabowo bersama Mayjen Kilfan Zein pamit. Bersama para pengawalannya, petinggi Kostrad itu segera meninggalkan Ciganjur.

**Tidak disinggung**  
Gus Dur menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu sama sekali tidak disinggung pertemuan antara Prabowo dengan sejumlah perwira tinggi ABRI dan sejumlah tokoh LSM dan aktivis ormas Islam di Makostrad sore harinya.

"Jadi tidak ada pembahasan khusus tentang kerusuhan itu, Gus?"

"Tidak ada," jawabnya sambil tiduran di ranjang kecil di kamarnya.

Bahkan sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul-Ulma (PBNU) itu mengaku tidak ingat pertemuannya dengan Prabowo.

Tentang pertemuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diumumkan dua hari lalu Gus Dur tidak mau memberikan komentar. Dia mengaku sudah mengetahui hasil lengkap TGPF itu sebelum diumumkan dari salah seorang anggota TGPF, KH Said Aqil Siradj.

Secara terpisah dia menyebut kesimpulan yang diumumkan TGPF itu sudah cukup akomodatif. "Saya tidak tahu kalau ada yang menanggapi dengan marah-marah," ujarnya. (las/P-1)

## Marzuki: Tugas Pemerintah untuk Mengusutnya

■ AS Desak Habibie Tindak Lanjuti Temuan TGPF

JAKARTA (Media): Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Marzuki Darusman menegaskan yang dipaparkan dalam temuan fakta ada pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. Apa isi pertemuan itu, kata dia, menjadi tugas pemerintah untuk melakukan investigasi.

"Kita bukan tim investigasi. Kita adalah tim pencari fakta. Faktanya ada pertemuan di Makostrad 14 Mei lalu. Apa isi pertemuan itu, soal investigasi. Silakan pemerintah melakukan investigasi," katanya dalam percakapan dengan Media di Jakarta, kemarin.

Menanggapi klarifikasi pertemuan Makostrad yang disampaikan Hashim S Djojohadikusumo, Marzuki mengatakan pihaknya menghormati upaya adik kandung Letjen TNI Prabowo Subianto itu. Tapi apakah klarifikasi tersebut sesuai fak-

ta yang ditemukan TGPF, itu merupakan tugas pemerintah untuk menjawabnya, tegas Marzuki.

Menurut Marzuki, saat TGPF sudah demisioner dan laporan TGPF sudah menjadi laporan pemerintah. Namun, kata dia, jika pemerintah membutuhkan keterangan TGPF menyangkut laporan itu pihaknya bersedia memberikan klarifikasi.

Dia berharap agar pejabat pemerintah membaca seluruh laporan yang disampaikan TGPF sebelum memberikan reaksi. Menurut dia, reaksi pejabat pemerintah baru menyentuh beberapa bagian dari laporan yang diangkat pers. "Masih ada temuan TGPF lainnya," kata Marzuki.

Pada kesempatan terpisah, tokoh Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) Siswono Yudihusodo dan Hayono Isman menegaskan pemerintah dan publik harus menindaklanjuti temuan TGPF tentang kerusuhan 14 Mei dan perkosaan massal tersebut.

Pengawasan itu disampaikan menjawab Media sesuai pendektaran GKPB Sumatera Barat di Padang, kemarin (5/11). Meskipun belum membaca secara lengkap temuan dan rekomendasi TGPF, Siswono berpendapat semua temuan tentang kerusuhan dan adanya kasus perkosaan atau pelecehan seksual terhadap kaum perempuan, dapat dipercaya.

"Karena ini menyangkut kredibilitas dan martabat bangsa, maka untuk menyikapinya tidak ada cara lain, pemerintah maupun pimpinan ABRI harus menindaklanjuti temuan TGPF, sehingga bisa diungkapkan siapa sesungguhnya dalam di balik peristiwa itu," kata Siswono.

**AS Mendesak**  
Desakan serupa juga datang dari Departemen Luar Negeri AS. Dalam pernyataan tertulisnya, yang disebarkan kepada pers via Kedubes AS, James Rubin mendesak pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti temuan TGPF.

Namun juru bicara Deplu AS itu juga menyekatkan Presiden Habibie agar "menambil langkah-langkah untuk mencegah intimidasi dan ancaman ke-

erusan terhadap para anggota tim, saksi-saksi, dan keluarga mereka." Pada kesempatan terpisah pengantar politik ABRI dan militer, pesimis pemerintah menindaklanjuti rekomendasi TGPF itu terutama berkaitan dengan desakan agar pemerintah menyelidiki pertemuan di Makostrad, untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan mantan Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto dan mantan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsudin dalam kerusuhan Mei 1998.

Arbi mengatakan sangat pesimis bahwa harapan masyarakat agar kasus tersebut diungkap tuntas akan terbalut. Alasannya, dalam masyarakat sekarang tidak ada kekuatan politik yang dapat mendesak pemerintah supaya kasus ini diselesaikan secara hukum sehingga semua misteri dapat diungkap di pengadilan.

Menurutnya, saat ini hanya mahasiswa yang menjadi kekuatan politik independen. (Gss/GT/SBL-1)

## Robby Djohan Pimpin Bank Mandiri

JAKARTA (Media): Susunan pengurus Bank Mandiri dirombak menyusul mundurnya Mulyo Hardjoko sebagai direktur utama. Posisi yang ditinggalkan dirut Tsipen itu, konon, akan diisi oleh Robby Djohan, Direktur Utama Garuda.

Pengumuman penggantian direksi Bank Mandiri dan Garuda itu dilakukan hari ini. Asisten Kepala Badan Bidang Komunikasi Meneg PBUMN Sofyan Jalil mengakui jabatan Robby Djohan sebagai Dirut Garuda segera diganti dan ia mendapat tugas baru yang lebih berat dari posisinya selama ini. "Surat keputusannya sedang digodok. Besok (hari ini-red)

akan diumumkan siapa penggantinya dan ke mana Pak Robby Djohan ditugaskan oleh Pak Menteri," ujar Sofyan di sela-sela seminar restrukturisasi dan privatisasi BUMN di Medan, kemarin.

Tugas Robby, katanya, bakal lebih berat dari posisinya selama ini. "Tidak ada orang lain yang mampu menduduki posisi itu, selain Robby Djohan," tegasnya tanpa mau menyebut pos baru Robby. Ketika didesak apakah Robby Djohan bakal diberi tugas menanganai Bank Mandiri, Sofyan tidak mengiyakan dan tidak menolaknya. "Tunggu saja besok pengumuman resmi dari Kantor Meneg PBUMN,

SK-nya sedang digodok."

Akan halnya alasan di balik pengunduran diri Mulyo Hardjoko belum juga terungkap. Yang jelas ketika ia diumumkan sebagai bos Bank Mandiri, banyak pihak mempertanyakan kemampuannya karena belum pernah menanganai bank.

Posisi Robby Johan di Garuda, disebut-sebut, akan diganti oleh Abdul Ghani, mantan Dirut Bank Duta yang tersingkir setelah kasus keculahan valas. Robby yang baru menduduki posnya Garuda empat bulan lalu adalah bankir senior. Terakhir ia menduduki jabatan dirut Bank Niaga. Media belum berhasil menghubungi Rob-

by dan Abdul Ghani untuk mengonfirmasikan berita tersebut.

Tanri Abeng juga enggan menyebutkan siapa yang bakal menduduki dirut Bank Mandiri dan Garuda. "Jadi, besok saja (hari ini-red) diumumkan," ujar Tanri di Bappenas, kemarin.

Saat disebut nama lain di luar Robby Djohan, yakni Cacuk Sudaryanto mantan Dirut Telkom, Tanri juga tidak memberikan jawaban. Ia cuma mengemukakan "Intelijen Anda bagus juga."

Di tempat terpisah Cacuk Sudaryanto mengaku hingga kemarin siang belum mendapat perintah untuk memimpin Bank Man-

diri. "Saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya apabila mendapat perintah, tapi sampai hari ini saya tidak tahu-menahu," ujar Dirjen Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil itu usai penandatanganan Kerja sama Depkop & PKM dengan Universitas Paramadina Mulya di Jakarta, kemarin.

Bank Mandiri adalah bank baru yang dibentuk oleh pemerintah yang kemudian akan mengambil alih usaha empat bank BUMN lainnya yakni Bank Exim, Bapindo, BBD, dan BDN. Proses penggabungan usaha ini akan memakan waktu tahunan.

(CS/AR/Mac/Hri/E-1)

## Moffett Diperiksa soal KK Freeport

JAKARTA (Media): Presiden Komisaris (Preskom) PT Freeport JR Moffett kemarin diperiksa selama enam setengah jam lebih di Kejaksaan Agung berkaitan dengan kontrak karya perusahaan tersebut yang diduga bermuatan KKN yang melibatkan Menko Ekwin Ginandjar Kartasasmita.

Moffett yang didampingi pengacara Minang Warman datang ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 07.30 WIB dan langsung diperiksa di ruang pemeriksaan Operasi Intelijen (Opsin). Dia diperiksa lima jam yang terdiri dari Kabid Kaji Pusat Operasi Intelijen Kejaksaan Muzammil Merah Hakim, Jaksa senior Charles Mow dan Jaksa Budiman Rahardjos.

Pemeriksaan baru selesai sekitar pukul 13.30 WIB.

Karena hasil pemeriksaan yang diketik mengalami kendala di layar komputer untuk dibacakan kepada Moffett akhirnya keterangan pers baru berlangsung pukul 15.30. Kepada puluhan wartawan yang menunggunya sejak pagi, Moffett mengatakan keatangannya ke Kejaksaan untuk menjelaskan mengenai transaksi bisnis Freeport di Indonesia.

"Ini kewajiban saya. Saya senang bisa datang untuk memberi keterangan kepada Kejaksaan karena bisnis Freeport dari dulu, kini, dan masa depan selalu terbuka," kata Moffett.

Pada bagian lain dia menegaskan tidak mungkin pihaknya membeli paten politik atau pejabat di Indonesia, karena tugas pokok Freeport adalah dapat memajukan perbaikan ekonomi di Indonesia dan Irian Jaya.

Moffett menambahkan Freeport tidak pernah dan tidak akan terlibat praktik KKN. Dia menjelaskan pemegang saham utama PT Freeport Indonesia (FI) adalah Freeport McMoran Copper & Gold (FCX) yang bermarkas di Amerika Serikat. FCX terdaftar di Bursa Efek New York dan harus mematuhi ketentuan dan peraturan-peraturan ketat yang ditetapkan Bursa dan US Securities and Exchange Commission.

Mengingat hubungan antara kontrak karya dengan FI tidak menyangkut perbaikan bagi Indonesia, Moffett menegaskan bahwa kontrak karya tersebut adalah perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang



JR Moffett

## Mari Bersandiwara di Taman Ria

GRUP Lawak Srimulat, konon, bubur dari Taman Ria Senayan lantaran kalah lucu ketimbang politikus yang bermaksud di sebelahnya, Gedung MPR/DPR. Taman Ria mau disulap jadi lokasi demonstrasi resmi, agar parlemen jalanan bisa bersandiwara?

Bisa jadi, Anda melihat banyak orang berkerumun di sekitar Taman Ria Senayan saat pelaksanaan Sidang Istimewa (SI) MPR, 10-13 November. Mereka berkumpul bukan untuk melawak, tapi bisa jadi melihat orang-orang yang seolah-olah sedang menirukan rakyat Taman Ria dan Lapangan



Umum, orang tidak boleh melarang polisi untuk berunjuk rasa. Tidak heran jika saat ini sudah banyak kelompok masyarakat yang memberitahukan kepolisan untuk berunjuk rasa selama pelaksanaan SI MPR.

Sekjen MPR/DPR Arief Ma'roef membenarkan. Parkir Timur Senayan dan ruas jalan di depan Taman Ria Senayan menjadi alternatif lokasi khusus untuk berde-

**4 Hari Menjelang SI MPR**  
10-13 November 1998

ta itu apalagi UU 9/1998 hanya membolehkan demonstrasi dalam radius 150 meter dari obyek gedung pemerintah yang dianggap penting. Dua lokasi itu, kata dia, masih dalam pembahasan dengan pihak kepolisian.

"Tahapan koordinasi dengan pihak kepolisian masih berlangsung, karena berkaitan aplikasi ketentuan jarak demonstrasi dari obyek yang didemo," katanya.

Sejak mahasiswa dievakuasi dari Gedung MPR/DPR menyusul pergantian pimpinan nasional, kawasan itu dijaga ketat. Aparat keamanan selalu mencegah demonstran masuk dalam kompleks. Sesuai permintaan Setjen MPR/DPR, hanya 15 orang perwakilan demonstran yang diizinkan masuk di dalam kompleks.

Kerap terjadi benturan fisik antara aparat dan demonstran

jatuhkan rezim Orde Baru. Saat ini mahasiswa dievakuasi dari Gedung MPR/DPR menyusul pergantian pimpinan nasional, kawasan itu dijaga ketat. Aparat keamanan selalu mencegah demonstran masuk dalam kompleks. Sesuai permintaan Setjen MPR/DPR, hanya 15 orang perwakilan demonstran yang diizinkan masuk di dalam kompleks. Kerap terjadi benturan fisik antara aparat dan demonstran